

Pengembosan Hak Angket

Mohammad Fajrul Falaakh

Telah beberapa kali pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBYJK) menunjukkan dinamika dan ketegangan internal. Ketegangan itu dari soal penempatan pejabat, pilihan kebijakan, hingga perilaku partai politik pendukung pemerintah di kabinet dan parlemen.

Politik hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) termasuk contoh menarik. Kronologi pelaksanaan hak yang dimiliki DPR itu menampakkan fenomena seolah-olah partai politik (parpol) pendukung pemerintah meninggalkan presiden.

Berbagai faktor dapat menjelaskan mengapa dinamika tersebut terjadi, di antaranya faktor kepemimpinan presiden (*presidential leadership*) yang sering terdistorsi oleh watak bawaan pemerintahannya, budaya kepartaian, dan perilaku para pemimpin partai politik yang menjadi mitra koalisi dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Faktor serupa juga dapat memengaruhi cara "mempermainkan" politik hak angket BBM 2008.

*** Keberhasilan pasangan SBY-JK memperoleh mandat langsung dari 60-an persen pemilih, pada pemilihan presiden 2004, tidak otomatis menempatkan SBY sebagai pemimpin tunggal dalam pemerintahan (*single office*). Watak kepemimpinan dalam sistem presidensial tersebut telah terdistorsi sejak awal, yaitu melalui pencalonan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004 yang dilakukan koalisi parpol (Pasal 6A ayat 2 UUD 1945).

Meskipun pasangan SBY-JK memperoleh mandat langsung dari rakyat, watak koalisi sebelum dan setelah Pilpres 2004 selalu muncul dan bekerja di panggung politik. Dampaknya segera terlihat pada pembentukan kabinet dan pembagian kursi pimpinan parlemen tahun 2004, penggantian kabinet, pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R) tahun 2006, maupun pengambilan berbagai kebijakan pemerintah.

Didukung budaya kepartaian yang tidak solid—dilihat dari ideologi dan program partai—parpol sengaja memanfaatkan peluang berkoalisi dalam berbagai masalah pemerintahan (*coalition by issue*). Meskipun Presiden bebas menyusun program pemerintahannya dan berkedudukan stabil—karena Presiden dan atau Wapres tak dapat dimakzulkan berdasarkan alasan politik—,kebijakannya tersandera oleh watak koalisi dalam pemerintahannya.

*** Politik hak angket DPR saat ini telah menjadi arena bermain yang menarik bagi parpol pendukung Presiden. Kecuali Partai Demokrat dan Partai Golkar, parpol pendukung pemerintah segera bergabung dengan pihak oposisi (PDIP) untuk mempersoalkan kebijakan menaikkan harga BBM melalui hak angket DPR.

Berbagai kemungkinan sedang berlangsung di balik politik hak angket tersebut; "politik kucing-kucingan" di antara parpol pendukung pemerintah, "politik dagang sapi" kebijakan menaikkan BBM, atau sebagai penajakan menuju realiansi politik menjelang Pemilu 2009. Bagi stabilitas kepresidenan dan kepentingan publik, mungkin politik hak angket terhadap kebijakan menaikkan BBM tidak menghasilkan apa-apa.

Mengapa? Pelarian parpol pendukung pemerintah untuk berkoalisi dengan PDIP dalam pelaksanaan hak angket DPR tersebut, sejak awal dijanjikan tidak berujung ke pelaksanaan hak interpelasi atau lebih-lebih ke proses pemakzulan. Sistem presidensial memang menjamin masa jabatan kepresidenan. Presiden dan atau wapres tak dapat dimakzulkan berdasarkan alasan-alasan politik yang longgar.

Alasan pemakzulan ditetapkan secara ketat (Pasal 7A-7B UUD 1945), yaitu apabila melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wapres.

Di sisi kebijakan, terbuka kemungkinan bahwa "pengamanan" terhadap kebijakan menaikkan BBM harus dilakukan melalui pertukaran kebijakan dengan parpol atau menteri pendukungnya, termasuk penggantian menteri yang bertanggung jawab di bidang energi oleh kader parpol pendukung pemerintah. Karena itu, politik hak angket perlu segera dikendalikan, misalnya melalui kesigapan Partai Golkar untuk memimpin Panitia Khusus (Pansus) Angket BBM.

Meskipun menolak pelaksanaan hak angket, kesigapan Partai Golkar tersebut menjadi modus bagi parpol pendukung pemerintah untuk "kembali ke barisan" dan menjadi alat tawar-menawar kebijakan dengan SBY. Kepresidenan tetap stabil, meskipun "kucing-kucingan" di kabinet tetap tampak di panggung politik dan "dagang sapi" kebijakan mungkin saja terjadi. Paling jauh hak angket hanya akan mempertanyakan kebijakan kenaikan BBM tanpa kelanjutan yang berarti, atau justru menggembos ditengah jalan.

Penggembosan dapat terjadi melalui rumusan teknis tentang jenis pertanyaan atau substansi apa yang akan diperdebatkan dalam kaitan dengan kebijakan tersebut. Politik hak angket dapat berakhir biasa-biasa saja. (Sumber: *Koran Sindo*, 5/7/2008)